

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Buku

Aditya, Zaka Firma, Muhammad Adiguna Bimasakti, dan Anna Erliyana. 2023.

Hukum Administrasi Negara Kontemporer (Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 168.

Asshiddiqie, Jimly dan Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*.

2006. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Basah, Sjachran. 1985. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 25.

- Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2017. *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 28.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenada Media Group, 109.
- Fuller, Lon Luvois. 1971. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 39-91.
- Hadjon, Philipus M. 2022. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kelsen, Hans. 2008. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Manullang, E. Fernando M. 2017. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 166-179.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 212.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 160.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 145.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 14-15.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 55-56.

Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 19.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 9-10.

Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 109.

Wiyono, R. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 194.

Jurnal

Arwanto, Bambang. 2016. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah." *Yuridika* 31, no. 3: 362-363.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4857>.

Asimah, Dewi, Zainal Muttaqin, dan Dewi Kania Sugiharti. 2020. "Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Tindakan Faktual (*Onrechtmatige Overheidsdaad*/OOD)." *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 4, no. 1: 155. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>.

Asyiah, Nur. 2016. "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1: 47-48.

Aulia, Muhammad Zulfa. 2018. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1: 164-165.
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

- Bimasakti, Muhammad Adiguna. 2022. "Penjelasan Hukum (*Restatement*) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1: 64-92. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.64-92>.
- Fauzani, Muhammad Addi dan Fandi Nur Rohman. 2020. "Problematisasi Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 1: 33-34. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.79>.
- Harahap, Ahmad Fauzi. 2020. "Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Upaya dalam Penegakan Hukum Administrasi dan Kaitannya dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*." *Binamulia Hukum* 9, no. 2: 173. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.126>.
- Harmono, Harry dan Rasji. 2024. "Problematisasi Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10: 14. <https://doi.org/10.56370/jhlrg.v5i10.939>.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1: 15.
- Missleini dan Evi Retno Wulan. 2024. "Asas Keadilan *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1: 186. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5828>.

- Putrijanti, Aju dan Lapon Tukan Leonard. 2019. "Kompetensi Peratun untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 7, no. 1: 110-111. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.605>.
- Ramadhani, Alqoni'atuz Zakiyatur, Lapon Tukan Leonard, dan Kartika Widya Utama. 2022. "Membedah Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT terkait Perluasan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Tindakan Faktual." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 230: 4. <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33439>.
- Ridwan. 2022. "Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 1: 90. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p07>.
- Tahir, Erdin, Rohendra Fathammubina, dan Jajang Arifin. 2024. "Model-Model Penilaian Sengketa Tindakan Faktual oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Yustitia* 10, no. 2: 158-160. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.284>.
- Wahyunadi, Yodi Martono. 2016. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1: 135-154. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.135-154>.
- Xanthoulis, Napoleon. 2019. "Administrative Factual Conduct: Legal Effects and Judicial Control in EU Law." *Review of European Administrative Law* 12, no. 1: 46-49. <https://doi.org/10.7590/187479819X15656877527188>.

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani. 2010. "Penerapan Konsep *Trias Politica* dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2: 336. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

Website

Hukumonline. "Menggali Karakter Hukum Progresif." <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3/>. Diakses pada 6 November 2025.

Wawancara

Josiano Leo Haliwela. Diwawancara pada 1 Desember 2025.